



Warga Diimbau Lebih Terbuka Sampaikan Informasi

Pemkot Jogja Lakukan Pendataan Penyandang Disabilitas

JOGJA - Tak adanya data valid jumlah penyandang disabilitas di Kota Jogja dituding sebagai penyebab lemahnya program pemberdayaan kaum difabel yang digalang pemerintah setempat. Bahkan, pemkot tak memiliki daftar keahlian dan keterampilan setiap difabel yang terdata.

Kepala Bidang Advokasi dan

Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Jogja Tri Maryatun tak menampik persoalan tersebut.

Karena itu, program pendataan difabel mulai ditintensifkan hingga dua bulan ke depan. Data awal yang ada di Dinsos menjadi modal awal untuk memperkuat akurasi jumlah penyandang disabilitas Kota Jogja. Meskipun data tersebut bukan merupakan hasil pendataan langsung.

"Kami akan datang langsung rumah-rumah para penyandang disabilitas. Juga berkoordinasi dengan ketua-ketua RT setem-

pat," ujar Atun, sapaannya, kemarin (29/5).

Proses pendataan bisa jadi akan menuai halangan. Menurut Atun, tak sedikit keluarga yang memiliki anggota difabel enggan menyampaikan informasi. Bahkan, ada yang memilih bungkam atau tidak mengakui keberadaan anggota keluarga yang difabel. Karena itulah tim surveyor akan menggali informasi dari tetangga atau ketua RT.

Jenis disabilitas yang didata tidak hanya fisik. Tapi juga mental, intelektual, dan sensorik. Pendataan sekaligus untuk meng-

Kami akan datang langsung rumah-rumah para penyandang disabilitas. Juga berkoordinasi dengan ketua-ketua RT setempat."

Tri Maryatun,
Kepala Bidang Advokasi dan
Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Jogja

gali kebutuhan penyandang disabilitas. Baik untuk menyokong keahlian dan keterampilan difabel, maupun pemenuhan alat bantu.

Hasil pendataan tersebut nantinya dijadikan dasar intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. "Data ini bisa digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang juga memiliki program untuk penyandang disabilitas," katanya.

Menurut Atun, proses pendataan akan rutin (di-up date) tiap

tiga tahun sekali. Hal itu merujuk Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 36 Tahun 2017. Pendataan dilakukan secara detail mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendataan dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat (PSM) dan relawan dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pendataan di lapangan akan berakhir pada 24 Agustus.

Terpisah, Wakil Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja Nurul Saadah Andriani sangat mendukung lang-

kah pemkot.

Hanya, dia mengingatkan agar petugas pendata tak mudah menyerah dengan informasi yang diperoleh di lapangan. Terutama dari keluarga penyandang disabilitas yang bungkam memberikan informasi. "Petugas juga harus cermat. Jangan sampai ada penyandang disabilitas yang tak terdata," katanya.

Nurul berharap, dari data yang diperoleh pemkot bisa mengulirkan program atau kebijakan yang tepat, berdasarkan kebutuhan tiap jenis disabilitas. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005